

# **ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN BELANJA PUBLIK DI KABUPATEN BOYOLALI**

**ANINDITA YULIARNI**  
**B 200 080 207**

**Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## ***ABSTRACT***

*This study is a follow-up study/replication of a public expenditure review conducted by the World Bank Indonesia in early 2008.*

*The purpose of this study was to analyze the budget share of education expenditure to total budget, analyzing the absorption rate of education spending through the budget, and to analyze the composition of direct and indirect expenditure to the total education budget education spending Boyolali. Expected from the results of this study can be useful to stakeholders in Boyolali to conduct its own assessment of the management of the budget.*

*The research method used in this study using the approach of PEA (Public Expenditure Analysis) or APP (Public Expenditure Analysis) in order to assess the public expenditure, especially for analyzing the education sector spending at the district/city.*

*The analysis states that the share of total budget expenditure on education is still far below 20 percent in accordance with the decisions set forth in Law no. 20 of 2003. While the achievement of above 20 percent also occur if the expenditure in education spending when adjusted for Mahkamah Konstitusional ruling of 2007. In the absorption of education spending by looking at the plan and the realization of the fiscal year 2005-2011 in the district each year Boyolali absorption increased education spending. As for the composition of direct and indirect spending to total education spending, education, indirect spending more dominant than the direct spending of education. Factors that affect one of them is the high share of wages due to the increasing number of teachers each year and the teachers who have since the era of centralization.*

*Key words: the portion of education spending budget, education budget spending absorption, direct and indirect spending budgets of education.*

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi ilmiah dengan judul :

**ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN BELANJA PENDIDIKAN DI  
KABUPATEN BOYOLALI**

Yang ditulis oleh:

**ANINDITA YULIARNI**  
**B 200 080 207**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2012

Dosen Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin S., Ak.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

## **A. PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan investasi dalam bidang pendidikan sebagai prioritas utama dan mengalokasikan persentase yang lebih besar dari anggarannya untuk sektor pendidikan (World Bank, 2008). Untuk mendasarinya, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen dan pasal 31 ayat (4) UUD 1945; “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Fungsi dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003).

Jenjang pendidikan terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi. Dengan Program Wajib Belajar 9 dalam Pendidikan Dasar di Indonesia merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup rakyat dengan mewajibkan semua warga Negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang harus mendapat prioritas dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.

Guna memenuhi amanat tersebut, dalam hal pembiayaan pendidikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan sebuah penegasan di pasal 49: “(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, “(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Dijelaskan juga dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 38, bahwa “Belanja pegawai (dalam belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pendanaan pendidikan dari sumber APBN dan APBD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan alokasi dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang sesuai dan tepat memungkinkan pengalokasian dana yang efisien dan adil (Ghozali, 2004).

Pemerintah menyebutkan pendidikan merupakan prioritas utama di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan mendapatkan 20% alokasi dana dari APBD diluar gaji pendidik. Bagi sebagian kabupaten, pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam anggaran pemerintah daerah dan rata-rata menyerap hampir satu per tiga dari pengeluaran di tingkat pemerintah daerah. Setiap tahunnya porsi belanja untuk pendidikan terus meningkat di hampir seluruh kabupaten/kota. Pendidikan di tingkat kabupaten juga menjadi urusan wajib pemerintah daerah sejak berlakunya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Akan tetapi, masih terdapat perbedaan dalam hal output dan pencapaian walaupun belanja pendidikan telah ditingkatkan. Prasarana pendidikan yang buruk khususnya terlihat pada tingkat pendidikan dasar (World bank, 2008). Pada akhirnya, besarnya anggaran pendidikan belum efektif dalam mempengaruhi kinerja sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor (Campos, 1996), yaitu: (1) distribusi guru yang kurang merata, (2) mutu sarana dan prasarana, merupakan salah satu faktor yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, serta (3) sumber daya.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, kurangnya keselarasan antara perencanaan serta penyusunan anggaran dan inefisiensi dalam alokasi anggaran juga dapat menghambat pencapaian sebagaimana yang diharapkan (Robert, 2003). Implikasinya, terkadang ketersediaan anggaran yang cukup besar (dalam nominal rupiah) namun tidak efektif dalam penggunaannya, sehingga dampaknya menjadi tidak begitu nyata bagi peningkatan kinerja pendidikan di masing-masing daerah (Reinnika and Smith, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh World Bank di tahun 2008 dalam hal investasi dalam pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis porsi belanja APBD pendidikan terhadap total APBD, menganalisis tingkat penyerapan belanja APBD pendidikan melalui APBD, menganalisis komposisi belanja langsung dan tidak langsung APBD pendidikan di kabupaten Boyolali terhadap total belanja urusan pendidikan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi APBD**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP No. 58 Tahun 2005). APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode

anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Proses dan Penyusunan APBD**

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Dalam pendekatan kinerja ada dua hal penting yang ditekankan, yaitu *output* atau *input*. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

### **Struktur APBD**

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah (Anggarini dan Puranta, 2010). Terdiri dari: a) pendapatan asli daerah (PAD), meliputi; dana perimbangan (dana bagi hasil dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus); b) pendapatan lain-lain daerah yang sah.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja (PP No. 58 Tahun 2005). Struktur belanja meliputi: a) Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga); b) Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pembagian Urusan Pemerintahan**

#### 1. Urusan Wajib

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar dan salah satunya adalah pendidikan.

#### 2. Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

*Sumber: PP No. 38 Tahun 2007*

### **Kerangka Hukum dan Arus Dana untuk Sektor Pendidikan**

#### 1. Kerangka Hukum

Tanggung jawab pemerintah daerah sehubungan dengan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan telah ditetapkan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan (World Bank, 2008), di antaranya yaitu: Undang-undang Dasar 1945 pasal 31, Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

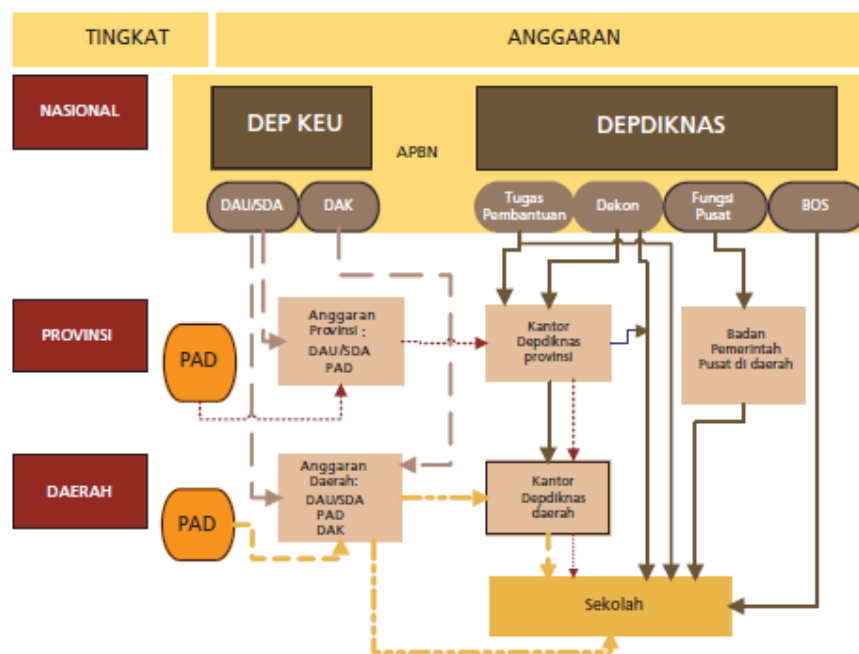
#### 2. Aliran Dana untuk Sektor Pendidikan

Pendanaan untuk sektor pendidikan ditingkat kabupaten dialirkan melalui beragam saluran, terutama pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) (World Bank, 2008).

Transfer dana langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah mencakup program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan per murid yang mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama, serta program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) guna mendukung sekolah kejuruan dan sekolah menengah tingkat atas.

Sedangkan untuk dana terdekonsentrasi biasanya digunakan untuk proyek seperti peningkatan kualitas sekolah dan rekonstruksi sekolah atau ruang kelas. Pendanaan tersebut dapat disalurkan langsung ke sekolah ataupun melalui dinas pendidikan terlebih dahulu tergantung pada rancangan khusus proyek.

**Gambar 3. Arus Dana dalam Belanja Pendidikan**



*Sumber:* World Bank

### **Belanja Pendidikan di Tingkat Daerah**

World Bank (2008) telah melakukan kajian pengeluaran publik dan pengelolaan keuangan pada tingkat daerah di 10 kabupaten di Indonesia. Sepuluh kabupaten tersebut di antaranya: Asahan dan Binjai (Sumatera Utara), Wonosobo dan Magelang (Jawa Tengah), Minahasa dan Manado



(Sulawesi Utara), Timur Tengah Selatan dan Belu (NTT), serta Jayawijaya dan Jayapura (Papua).

Indonesia telah mengalami peningkatan belanja pemerintah (nasional) untuk sektor pendidikan. Pengeluaran agregat di tingkat daerah pada tahun 2006, termasuk di 10 kabupaten/kota tersebut, telah dapat memenuhi amanat undang-undang '20 persen' dengan belanja gaji diikutsertakan dalam perhitungan. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan bahwa ketentuan 20 persen dari total pengeluaran harus mencakup seluruh pengeluaran pendidikan (termasuk pengeluaran gaji) di setiap tingkat pemerintahan.

Metode yang digunakan yaitu pendekatan PEACH (*Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization*) atau Analisis Pengeluaran Publik dan Penyelarasan Kapasitas. PEACH merupakan suatu metode analisis yang digunakan oleh World Bank dalam mengkaji pengeluaran publik terutama untuk menganalisis belanja sektor pendidikan di tingkat kabupaten/kota. PEACH telah diterapkan di sejumlah provinsi seperti di Gorontalo, Nias, Aceh, dan Papua.

Didalam metode PEACH menjelaskan tentang porsi belanja pendidikan (*the portion of education spending budget*) yang diperoleh dari rasio antara total belanja urusan pendidikan dengan total belanja APBD. Kemudian mendapatkan bahwa dari 10 kabupaten/kota tersebut di atas, porsi belanja APBD pendidikan apabila sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pada tahun 2006, tidak ada satu kabupaten pun yang memenuhi amanat Undang-undang. Untuk belanja APBD pendidikan diluar gaji masih dibawah angka 10 persen. Pencapaian presentase porsi tertinggi dipegang oleh kabupaten Timur Tengah Selatan-NTT, yaitu sebesar 8,9 persen dari total belanja APBD. Sedangkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 dimana gaji pegawai termasuk dalam 20 persen alokasi dana pendidikan, hasil kajian didapati bahwa belanja pendidikan hampir di seluruh kabupaten/kota melebihi 20 persen dari total belanja APBD.

Dalam penyerapan belanja pendidikan (*education budget spending absorption*) Worldbank menghitung dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi anggaran, dengan membandingkan penyerapan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Dalam kajian pengeluaran publik menjelaskan penyerapan belanja rutin serta pembangunan pendidikan dan hampir seluruh anggaran terserap dengan baik. Penyerapan tertinggi untuk belanja rutin tahun 2005 dipegang oleh kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar 102,7 persen, untuk belanja pembangunan penyerapan tertinggi dipegang oleh kabupaten Minahasa dan Jayapura sebesar 100 persen. Salah satu faktor yang dapat menghambat penyerapan anggaran secara penuh adalah lambatnya proses persetujuan APBD. Belanja rutin sama halnya dengan belanja tidak langsung, yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, serta cicilan dan bunganya atas berbagai pinjaman pemerintah. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, gedung, jembatan dan lain-lain.

Kemudian dalam komposisi belanja rutin dan belanja pembangunan dengan total belanja pendidikan (*direct and indirect spending budgets of education*) dalam hasil kajian pengeluaran publik pendidikan, perbandingan antara keduanya cukup signifikan, belanja rutin jauh lebih besar dari belanja pembangunan. Lebih dari 90 persen dari belanja pendidikan dialokasikan untuk belanja rutin di beberapa kabupaten. meskipun kabupaten yang lain mengalami peningkatan maupun relatif konstan untuk alokasi belanja pembangunan.

World Bank (2007), dalam kajian pengeluaran publik di Indonesia tahun 2007, untuk sektor pendidikan alokasi anggaran mencapai 17,2 persen dari total pengeluaran publik (APBN). World Bank (2005), melakukan Analisis Pengeluaran Publik (PEA) di Papua, dan menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu sektor prioritas. Porsi anggaran untuk pendidikan di tingkat kabupaten/kota turun dari dua puluh tiga persen menjadi delapan belas persen antara 2001-2003, sementara di tingkat provinsi meningkat dua kali lipat, dari

lima persen menjadi sepuluh persen. Namun, memang hingga kini belum ada daerah yang mengikuti UU Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa seluruh tingkat pemerintahan harus mengalokasikan 20 persen anggaran, di luar biaya gaji, untuk pendidikan.

### C. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Di dalam penelitian lanjutan ini, peneliti menggunakan pendekatan Analisis Pengeluaran Publik (APP) atau *Public Expenditure Analysis* (PEA). APP tidak hanya difokuskan pada pola belanja kabupaten/kota, melainkan juga tinjauan terhadap kerangka hukum sehubungan dengan belanja pendidikan dan proses perencanaan dan penganggaran (World Bank, 2008).

#### Metode Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, catatan harian dan yang lainnya (Suharsimi, Arikunto, 1998). Data yang di ambil adalah data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif (Teguh, 2001). Data yang di gunakan yaitu data sekunder (peneliti sebagai tangan kedua) dan umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder di peroleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali mulai periode 2005-2011. Tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

- 1) Analisis Porsi Belanja Pendidikan terhadap Total APBD

$$\text{Porsi Belanja Pendidikan thd Total APBD} = \frac{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

2) Analisis Tingkat Penyerapan Belanja APBD Pendidikan melalui APBD

$$\text{Rasio Realisasi/Rencana APBD Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Pendidikan APBD Realisasi}}{\text{Total Belanja Pendidikan APBD Rencana}}$$

3) Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Pendidikan

$$\% \text{Belanja Langsung Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Langsung APBD Pendidikan}}{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}$$

$$\% \text{Belanja Tidak langsung Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung APBD Pendidikan}}{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}$$

#### D. HASIL PENELITIAN

##### Analisis Porsi Belanja Pendidikan terhadap Total APBD (Bahasan I)

Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar porsi belanja APBD pendidikan di Kabupaten Boyolali dari keseluruhan APBD. Jika disesuaikan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, hasilnya dari tahun 2005-2011 menunjukkan bahwa kabupaten Boyolali belum memberikan porsi sebesar 20 persen untuk pendidikan diluar gaji pegawai serta biaya kedinasan. Tetapi jika porsi tersebut disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa gaji pegawai termasuk dalam 20 persen anggaran pendidikan, hasilnya kabupaten Boyolali telah memenuhi amanat tersebut,

##### Analisis Tingkat Penyerapan Belanja APBD Pendidikan melalui APBD (Bahasan II)

Analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui besarnya penyerapan dana APBD untuk urusan pendidikan, dengan membandingkan antara

realisasi dengan anggaran/rencana APBD yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan pendidikan di kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa anggaran pendidikan terserap dengan baik (lebih dari 90 persen), kecuali di tahun 2006 dan 2010 yang hanya mencapai angka 70 persen.

### **Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Pendidikan (Bahasan III)**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk komposisinya belanja tidak langsung lebih dominan dengan lebih dari 70 persen anggaran daripada belanja langsung pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah gaji pegawai karena banyaknya jumlah guru PNS di Indonesia.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan I menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan (di luar gaji) terhadap total belanja APBD masih jauh di bawah 20 persen anggaran yang telah ditetapkan pada UU No. 20 Tahun 2003. Porsi belanja pendidikan terendah di kabupaten Boyolali ada pada tahun 2009 diiringi dengan peningkatan total APBD. Tetapi porsi belanja akan meningkat secara signifikan apabila gaji pegawai dimasukkan ke dalam belanja pendidikan dengan latar belakang hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.

Dari hasil pembahasan II menunjukkan bahwa penyerapan untuk belanja APBD di kabupaten Boyolali cukup baik. Hampir keseluruhan anggaran yang direncanakan telah terealisasi, terkecuali tingkat penyerapan belanja untuk tahun 2006 dan 2010 yang menurun dengan tingkat prosentase 71,28 persen dan 76,01 persen. Sedangkan untuk tahun sebelum dan sesudahnya, tingkat penyerapan belanja pendidikan telah menembus angka di atas 90 persen.

Dari hasil pembahasan III menunjukkan bahwa komposisi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung APBD pendidikan. Hal ini

disebabkan oleh pengalokasian gaji pegawai yang cukup besar dalam belanja tidak langsung APBD pendidikan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran guna perbaikan penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat diberikan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa membandingkan APBD dari beberapa kabupaten di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita, Hendra Puranta. 2010. *ANGGARAN BERBASIS KINERJA: Penyusunan APBD secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Campos, Jose Edgardo, Sanjay Pradhan. 1996. Evaluating Public Expenditure Management System. *Published in the Journal of Policy Analysis and Management*, Summer 1997.
- Ghozali, Abbas. 2004. *Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Naga, Dali Santun. 2007. *Tanggungjawab Sekolah dan Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan*. Seminar Pendidikan Indonesia oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (Gapendi). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Reinikka, Ritva, Nathanael Smith. 2004. Public Expenditure Tracking Surveys in Education. *International Institute for Educational Planning*. Paris.
- Roberts, John. 2003. Poverty Reduction Outcomes in Education and Health: Public Expenditure and Aid. *Overseas Development Institute*. London.
- Soebagiyo, Drs. Daryono, MEc. 2005. *Perekonomian Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Teguh, Muhammad. 2001. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Manajemen. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di amandemen tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Bank, 2005. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik Pada Wilayah Tertinggal di Indonesia: Analisis Pengeluaran Publik Papua*. Kantor Bank Dunia: Jakarta.
- World Bank, 2007. *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru*. Kantor Bank Dunia: Jakarta.
- World Bank, 2008. *Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*. Kantor Bank Dunia; Jakarta.
- World Bank, 2010. *Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah*. Kantor Bank Dunia: Jakarta.
- <http://www.boyolalikab.go.id/>